BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian.

Hukum keluarga merupakan suatu bidang yang memiliki permasalahan yang mengandung beberapa unsur yang rumit, sulit dan saling berhubungan serta akan berubah dan berkembang mengikuti perkembangan masyarakat dan perubahan sistem pemerintahan suatu negara, hal ini yang membuat para ahli dan akademisi dibidang hukum selalu berfikir dalam setiap permasalahan yang baru muncul. Di negara Indonesia terdapat Undang-Undang secara khusus yang mengatur tentang perkawinan, dalam Undang-Undang ini menyebutkan secara runtun semua syarat-syarat dan ketentuan sebuah proses perkawinan.

Pernikahan merupakan sebuah perjanjian yang kuat, hal ini tertuang dalam Q.S An-Nisa (4) : 21 yang isinya.

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ ۚ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ۚ ٢١

Artinya: “Bagaimana kamu akan mengambilnya (kembali), padahal kamu telah menggauli satu sama lain (sebagai suami istri) dan mereka pun (istri-istrimu) telah membuat perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) denganmu?”¹

Pada ayat diatas terdapat kalimat *Misaqan Galizan* yang merujuk kepada sebuah perjanjian yang terikat dengan kokoh.² Dalam perkawinan dapat dikatakan sebuah perjanjian yang kuat karena dari sebuah kesepakatan kedua belah pihak dan tidak akan dirusak oleh keduanya. Perkawinan merupakan

¹ Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 109.

² M. Quraish Shihab, “Tasir Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an”, (Jakarta: Lentera Hati, 2009), 387.

suatu ikatan yang kuat antara suami dan istri baik itu secara lahir maupun batin dan yang bersifat *mitsaqon ghalidlon* dalam Pernikahan memiliki tujuan yang mulia dalam melestarikan dan menjaga kelestarian hidup dalam berumah tangga, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal hal ini berada di pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Tujuan lain dari perkawinan adalah untuk menjaga stigma negatif dari pandangan masyarakat, membentuk dan mendidik generasi yang bermanfaat di hari tua, menghindari diri dari kerusakan seksual yang ditimbulkan dari perzinahan, dan menjadikan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah serta tujuan paling penting sebuah perkawinan ialah memperjelas nasab anak yang dihasilkan dari hubungan suami/istri serta memperjelas hukum kewarisan.³ Tidak bisa dihindari bahwa perkawinan sebuah wadah penyaluran kebutuhan biologis umat manusia yang sah serta wajar sehingga perkawinan dalam Islam menjadi ajaran yang penting. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya dijadikan sebagai tradisi dan sunah Nabi yang jika dilaksanakan bernilai ibadah.⁴

Perkawinan bisa dikatakan sebuah perbuatan hukum dan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam Undang-Undang tersebut sudah di jelaskan secara runtut syarat-syarat perkawinan untuk mencapai tujuan perkawinan. Syarat tersebut tertuang dalam Pasal 6 hingga Pasal 12 yang mengatur tentang persetujuan kedua calon

³ Nurmilah Sari, "Dispensasi Nikah di Bawah Umur (Study Kasus di Pengadilan Agama Tangerang Tahun 2009 – 2010)", *skripsi*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2011), 2.

⁴ Umi supraptiningsih dan Erie Hariyanto, "Perkawinan Anak: Pandangan Ulama dan Tokoh Masyarakat Pamekasan", *jurnal harkat: Media Komunikasi Gender*, 15, (2019), 97.

mempelai, surat izin orang tua bagi mempelai dibawah umur 21 tahun, larangan untuk melangsungkan perkawinan, tidak terikaat oleh perkawinan lainnya, tidak dilangusngkan pernikahan oleh seorang suami istri yang sama dan sudah bercerai dua kali, menjelaskan tentang adanya peraturan masa tunggu/iddah (bagi janda) serta adanya tata cara perkawinan yang diatur Undang-Undang tersendiri.⁵

Pada perkembanganya, hal yang mengatur usia minimal perkawinan mengalami perubahan, yang mulanya minimal usia perkawinan 16 tahun bagi calon mempelai perempuan dan 19 tahun bagi calon mempelai laki laki, yang kemudian berubah dalam Pasal 7 (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bagi setiap calon mempelai laki laki dan perempuan diwajibkan dalam Undang-Undang ini telah berumur 19 tahun.⁶ Adanya perubahan batas usia minimal perkawinan ini dimaksud untuk menekan atau meminimalisir angka terjadinya pernikahan dini.

Pernikahan dini memberikan dampak negatif yang cukup besar bagi para pelakunya⁷, antara lain: memengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak, hak dasar anak yang tidak terpenuhi, yang didalamnya mencakup hak perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan,

⁵ Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (Bandung: Citra Umbara, 2012), 3-4.

⁶ Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan,2.

⁷ Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan,1.

hak sosial anak, dan hak pendidikan.⁸ Dari dampak yang sudah disebutkan, pernikahan dini memberikan pengaruh pada masa depan anak muda yang dapat membatasi ruang gerak bagi para penerus bangsa yang menyebabkan mereka tidak mampu melakukan kegiatan yang biasa dilakukan pada kebanyakan anak seusianya. Oleh karena itu, melangsungkan pernikahan yang tidak sesuai dengan ketentuan batas usia perkawinan harus diminimalisir sekecil mungkin sebagai bentuk pencegahan terhadap kekhawatiran dari dampak yang timbul akibat dari Pernikahan dini.⁹ Maka, dengan diubahnya minimal usia perkawinan merupakan salah satu bentuk usaha pemerintah untuk meminimalisir terjadi pernikahan dini di Indonesia

Oleh sebab itu, sangat disayangkan bila semua orang yang terlibat dalam perkawinan tidak bisa memahami terhadap hakikat dan tujuan perkawinan, yaitu mendapatkan kebahagiaan sejati dalam satu biduk rumah tangga. Ketika akan melaksanakan rumah tangga, seseorang yang *notabane* masih muda dan belia hanya bisa mengartikan bahwa perkawinan merupakan suatu hal yang berkaitan dengan cinta, romantisme dan keindahan belaka, hanya karena mereka masih belum merasa memiliki tanggung jawab yang sempurna.¹⁰

⁸ Fathur Rahman Alfa, MA, "Pernikahan dini dan Perceraian di Indonesia" *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah*, 1, (2019), 52.

⁹ Muhammad Fauzul Adhim, Ach. Faisol dan Moh. Muslim, "Pendapat Hakim Mengenai Efektifitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 Tentang Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas 1a", *Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, 2 (2021), 160.

¹⁰ Faris El Amin, Theadora Rahmawati, Hosen, Achmad Fauzi, Eka Susylawati, Ainol Yaqin, Videia Dewi Saputri, Ainol Yaqin, "Peningkatan pemahaman batas usia perkawinan dalam UU 16/2019 dan persiapan mental pra nikah santri Daarul Lughoh Palengaan Pamekasan", *Perdikan*, 2, (2023), 113.

Pada penerapannya, Pasal 7 ayat (1) di Daerah Kabupaten Sumenep sendiri masih tergolong jauh dari kata sempurna, walaupun usia perkawinan diatur dalam Undang-Undang, hal ini disebabkan masih banyak masyarakat/orang tua masih banyak yang beranggapan bahwa ketika seorang anak yang tidak segera menikah adalah tabu, malu dan dianggap tidak laku walaupun anak tersebut masih bersekolah. Bahkan, di daerah pedesaan menjadi hal yang lumrah jika seorang anak hanya dimasukkan kedalam pesantren hanya untuk menunggu jodoh.¹¹ Pelaksanaan perkawinan anak pada masyarakat Sumenep biasanya diawali dengan pertunangan yang telah dipilih oleh kedua orang tua. Umumnya anak-anak akan dijodohkan dengan kerabat dekat dan bahkan perjodohan itu sendiri bisa dimulai dalam masa kandungan. Acara pertunangan biasanya dilangsungkan secara meriah seperti perkawinan/walimah.¹²

Selain itu, banyak faktor yang mempengaruhi orang tua untuk melakukan pernikahan dini diantaranya: masyarakat masih berpedoman kepada Hukum perkawinan yang ada di Fiqih atau secara agama, banyak orang tua yang takut dan cemas kepada anak melakukan perbuatan yang mendekati zina, kemudian adanya faktor ekonomi, dan faktor tradisi (tompangan).¹³

Dalam meminimalisir pernikahan dini yang menjadi tujuan diubahnya Undang-Undang Pernikahan, Pengadilan Agama Sumenep berkolaborasi

¹¹ Hariyanto, "Perkawinan Anak: Pandangan Ulama dan Tokoh Masyarakat Pamekasan", 97.

¹² Theadora Rahmawati¹, Umi Supraptiningsih, M. Makhrus Fauzi, "Tradisi Perkawinan Anak Di Madura (Diskursus UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dan Hukum Islam)", *ICONIS*, 6 (November, 2022), 220.

¹³ Bapak Moh. Jatim, "Ketua Pengadilan Agama Sumenep, Wawancara Langsung", (Benasare, 2024).

dengan ibu PKK (Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga) kepada orang tua yang memiliki anak dibawah umur yang berada di Kabupaten Sumenep melakukan sosialisasi pencegahan pernikahan dini dalam upaya mengurangi angka stunting. Karena salah satu dampak yang ditimbulkan dari pernikahan dini adalah seorang anak akan mengalami stunting atau gangguan pertumbuhan pada anak yang dihasilkan.¹⁴

Kemudian, tentang Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pasal 7 (2) menjelaskan bahwa jika terjadi penyimpangan terhadap ayat (1) maka salah satu orang tua dari calon mempelai atau kedua belah pihak bisa mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama dengan alasan mendesak dan bukti bukti pendukung yang cukup.¹⁵

Dengan kata lain, permohonan dispensasi nikah bisa diajukan bagi mereka yang ingin melangsungkan perkawinan tetapi salah satu mempelai atau bahkan keduanya masih dibawah umur yang diatur oleh UUP. Dalam bahasa hukum dispensasi nikah suatu pemberian keringanan kepada pria dan wanita dari suatu larangan dan/atau kewajiban dalam memenuhi persyaratan pelaksanaan perkawinan. Dispensasi Nikah menurut Bapak Moh. Jatim dikatakan suatu pemberian dispen atau izin kepada calon pengantin yang umurnya belum mencapai usia nikah dengan syarat alasan yang mendesak dan

¹⁴ Bapak Moh. Jatim, “Ketua Pengadilan Agama Sumenep, Wawancara Langsung”, (Benasare, 2024).

¹⁵ Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, 3.

bukti-bukti pendukung yang cukup sebagai mana yang diatur ayat 1 Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019”.¹⁶

Ketentuan ini bisa menimbulkan kontradiksi atau bertolak belakang dengan tujuan awal dinaikannya usia minimal perkawinan, yang mana tujuan dinaikannya usia minimal perkawinan adalah mencegah atau meminimalisir terjadinya pernikahan dini. Maka dapat dikatakan dispensasi nikah bisa dijadikan sebagai sebuah kesempatan bagi masyarakat menemukan sebuah peluang untuk melakukan pernikahan dini. Yang pada akhirnya Pasal 7 (2) sering kali dicap sebagai pihak yang melegalkan bahkan mempermudah proses pernikahan dini.

Kemudian, Pada Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomer 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, pengajuan permohonan dispensasi kawin hanya diperbolehkan harus berdasarkan alasan mendesak, di pasal ini tidak dijelaskan secara gamblang dan rinci alasan mendesak yang tertera dalam Undang-Undang sehingga menciptakan peluang bagi masyarakat untuk mengajukan dispensasi kawin untuk melakukan pernikahan dibawah umur.¹⁷

Hal ini sejalan dengan temuan pasca Undang-Undang ini berlaku, pernikahan dibawah umur melalui perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama se-Indonesia menerima setidaknya 50.746 perkara dispensasi nikah yang diputus pada tahun 2022 dan Jawa Timur menempati urutan terbanyak se

¹⁶ Bapak Moh. Jatim, “Ketua Pengadilan Agama Sumenep, Wawancara Langsung”, (Benasare, 2024).

¹⁷ Muslim, “Pendapat Hakim Mengenai Efektifitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 Tentang Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas 1a,” 162.

Indonesia dalam memutus permohonan dispensasi kawin yakni sebanyak 15.253 perkara.¹⁸ Hal ini juga dialami oleh Pengadilan Agama Sumenep pada pengajuan permohonan dispensasi kawin. Dispensasi kawin yang di putus oleh Pengadilan Agama Sumenep sejak tahun 2020 hingga 2023 mencapai angka 1.212 perkara.¹⁹

Di lain sisi, dalam proses persidangan Hakim mengalami kesulitan dalam memeriksa dan mengadili permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sumenep. Hal ini dikarenakan dalam pasal 7 ayat 2 tidak dijelaskan dengan rinci maksud dari “alasan yang mendesak” sehingga membuat majelis hakim kesulitan untuk memutuskan permohonan dispensasi kawin, walaupun terdapat bahan acuan yang bisa digunakan oleh majelis hakim untuk membantu memutuskan permohonan dispensasi nikah yakni PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin. Majelis Hakim masih merasa kesulitan untuk memutuskan permohonan ini. contohnya pada kasus permohonan dispensasi kawin terhadap pasangan dibawah umur yang hamil diluar nikah, untuk menentukan permohonan ini di kabulkan atau tidak majelis hakim harus melihat kemanfaatan dari pasangan yang ingin menikah dan anak dari hasil hubungan diluar nikah yang masih memerlukan peran orang tua, serta melihat kepentingan terbaik bagi pasangan yang ingin menikah atau anak dari hasil hubungan di luar nikah. Sehingga majelis hakim

¹⁸ Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, “rekap data jenis perkara dispensasi kawin peradilan agama tahun 2022”, https://kingsatker.badilag.net/JenisPerkara/perkara_persatker/362/2022, diakses pada 24 September 2024.

¹⁹ Palatua, *Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021 dan 2023 Pengadilan Agama Sumenep*, (Sumenep: Pengadilan Agama Sumenep, 2023), 11.

mengabulkan permohonan tersebut dengan pasrah demi keberlangsungan hidup anak yang sedang dikandung.²⁰

Dengan data diatas terkait jumlah pengajuan Dispensasi Nikah semakin menguatkan pandangan awal peneliti bahwa didalam pasal 7 ayat (1 dan 2) terindikasi adanya kontradiksi atau saling bertolak belakang yang mana ayat (1) memiliki tujuan untuk meminimalisir dan menekan angka pernikahan dini, tetapi terdapat di ayat (2) sebuah peluang baru untuk melakukan pernikahan dini di kalangan masyarakat.

Permasalahan ini juga disampaikan oleh bapak Moh. Jatim, selaku Ketua Pengadilan Agama Sumenep mengatakan bahwa “Pada Pasal 7 ayat 1 sangat bagus bila diterapkan dengan maksimal karena pernikahan dibawah umur sangat tidak dibenarkan baik secara hukum maupun agama. Tetapi di Ayat (2) memberikan jalan alternatif bagi pelaku pernikahan dibawah umur yang bisa jadi tujuan untuk meminimalisir pernikahan dini menjadi angan angan saja.” Selanjutnya “Memang pada Undang-Undang ini terdapat kontradiksi pada Pasal 7 ayat 1 dan 2, kedua ayat ini seolah olah seperti sistem buka tutup, maksudnya ialah ditutup/memperketat untuk melakukan pernikahan dini namun di satu sisi membuka peluang bagi masyarakat untuk melakukan pernikahan dini. Sehingga Undang-Undang ini dipandang sebagai salah satu cara untuk melegalkan pernikahan dini.”²¹ hal ini terbukti pada permohonan dispensasi

²⁰ Bapak Moh. Jatim, “Ketua Pengadilan Agama Sumenep, Wawancara Langsung”, (Benasare, 2024).

²¹ Bapak Moh. Jatim, “Ketua Pengadilan Agama Sumenep, Wawancara Langsung”, (Benasare, 2024).

kawin yang di putus oleh Pengadilan Agama Sumenep sejak tahun 2020 hingga 2023 mencapai angka 1.212 perkara.”²²

Kemudian Bapak Hirmawan Susilo, S.H, M.H. memiliki pemaparan yang berbeda tentang hal ini “Undang-Undang ini jika hanya dilihat satu sisi akan menimbulkan kontradiksi, maka kita sebagai praktisi hukum perlu adanya kajian dan penelitian dari segi manapun maka untuk menentukan benar tidaknya Undang-Undang ini terindikasi terjadinya kontradiksi didalam Undang-Undang tersebut”.²³

Maka berdasarkan latar belakang yang peneliti paparkan diperlukannya penelitian bagaimana seorang hakim Pengadilan Agama menilai dan mengkaji antara ayat 1 dan ayat 2 pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Dari deskripsi diatas peneliti berinisiatif untuk memberi judul pada penelitian ini “(Pandangan Hakim Pengadilan Agama Sumenep Terhadap Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan).”

²² Palatua, *Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021 dan 2023 Pengadilan Agama Sumenep*, 11.

²³ Bapak Hirmawan, Hakim Pengadilan Agama Sumenep, *Wawancara Langsung*, (Sumenep, 11 November 2024).

B. Fokus Penelitian.

Adapun yang menjadi fokus penelitian sesuai latar belakang di atas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan Hakim Pengadilan Agama Sumenep tentang ketentuan Pasal 7 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan?
2. Apa argumen hakim Pengadilan Agama Sumenep terhadap Pasal 7 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan?
3. Bagaimana penerapan Pasal 7 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Pengadilan Agama Sumenep?

C. Tujuan Penelitian.

1. Untuk mengetahui pandangan Hakim Pengadilan Agama Sumenep tentang ketentuan Pasal 7 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
2. Untuk mengetahui argumen hakim Pengadilan Agama Sumenep terhadap Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

3. Untuk mengetahui penerapan Pasal 7 Ayat 1 dan 2 Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Pengadilan Agama Sumenep.

D. Kegunaan Penelitian.

Penelitian ini dapat bermanfaat terhadap beberapa pihak baik secara teoritis maupun secara praktis, adapun kegunaan penelitian dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini dapat memberikan kegunaan, menambah wawasan serta bisa dijadikan bahan bacaan untuk menambah wawasan serta bisa dijadikan bahan bacaan dan referensi oleh peneliti berikutnya dengan tema yang serupa. Dan penelitian ini bisa dijadikan pertukaran informasi dan memberikan manfaat bagi keluarga diantaranya:

- a. Bagi Institut Agama Islam Negeri Madura

Hasil penelitian ini bisa dijadikan sumber wawasan dan pengetahuan sehingga dapat dijadikan salah satu referensi, khususnya pada kepentingan perkuliahan dan untuk peneliti berikutnya.

- b. Bagi Penulis

Sebagai bahan untuk mengaplikasikan teori yang diperoleh selama studi diperguruan tinggi dengan kasus-kasus yang ada di dunia nyata.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat bagi masyarakat untuk dijadikan rujukan terhadap Pandangan Hakim Terhadap Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Pengadilan Agama Sumenep.

E. Definisi Istilah.

Dalam judul penelitian ini terdapat beberapa istilah yang perlu dijelaskan secara operasional, oleh karena itu peneliti perlu memberikan batasan pengertian secara definitif agar dapat lebih mudah dipahami dan dimengerti. Ada beberapa istilah tersebut diantaranya:

1. Perkawinan

Perkawinan adalah hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat tertentu, dan jika dicermati pada dasarnya perkawinan merupakan suatu perjanjian yang mengikat lahir dan bathin dengan dasar iman.

2. Dispensasi Kawin

Dispensasi kawin dapat diartikan diizinkan pernikahan dibawah umur dengan mengajukan permohonan kepada pengadilan dengan bukti dan alasan alasan yang dapat diterima serta berdasar kepada kebijakan hakim.

3. Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

Perma adalah aturan dari prinsip Mahkamah Agung yang dituju kepada semua penyelenggara peradilan, yang berisi aturan yang bersifat hukum acara peradilan. Sedangkan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 mengatur tentang pedoman menyelesaikan perkara dispensasi kawin.